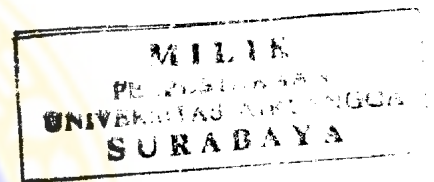


1710
Per. 02/01
Mah
P

SKRIPSI

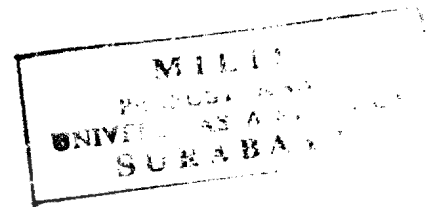
ABDULLAH MAHRUS

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH
(Tinjauan Hukum Pasal 20 Ayat (1) Huruf c Kepmenaker Nomor 150
Tahun 2000)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2001**

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH
(Tinjauan Hukum Pasal 20 Ayat (1) Huruf c Kepmenaker Nomor 150
Tahun 2000)**




SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 131878388



Abdullah Mahrus
NIM. 039714575

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Upaya hukum bagi pekerja atas keterlambatan pembayaran upah, dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara. *Pertama* adalah dengan memberikan kewajiban pada pengusaha untuk membayar upah disertai dengan tambahan bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1602 q B.W. dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981. *Kedua* adalah dengan melakukan pemutusan hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 1603 p angka 3 B.W. dan Pasal 20 ayat (1) huruf c Kepmenaker 150 tahun 2000. *Ketiga* adalah pihak pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar Wanprestasi.
- b. Perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami Pemutusan hubungan kerja karena keterlambatan pembayaran upah, berdasarkan Kepmenaker 150 tahun 2000 adalah dengan memberikan hak-hak normatif yang harus diterima oleh pekerja baik berupa uang pesangon, uang jasa maupun ganti kerugian yang pembayarannya dilakukan **secara tunai dan dilipatkan 2 (dua) kali lipat**. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Pasal 1603 s B.W. yang hanya memberikan ganti rugi menurut masa kerja dan ganti rugi sepenuhnya.

2. Saran-saran

- a. Upaya hukum atas keterlambatan pembayaran upah melalui pemutusan hubungan kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1603 p angka 3 B.W. maupun dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c Kepmenaker 150 tahun 2000 hendaknya digunakan sebagai upaya hukum terakhir (ultimum remedium) dalam penyelesaian masalah tersebut, setelah upaya hukum lain sudah tidak dapat dilaksanakan lagi.
- b. Dalam hal pemutusan hubungan kerja sudah tidak dapat dihindari lagi, maka akibat yang akan diterima pekerja harus betul-betul mendapat perhatian. Perlindungan hukum yang ada, sampai dengan berlakunya Kepmenaker 150 tahun 2000, masih menekankan pada aspek ekonomisnya saja dan mengabaikan aspek-aspek lainnya, seperti aspek sosial maupun aspek psikologis dari pekerja. Oleh karena itu, seharusnya perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja tidak hanya menekankan aspek ekonomisnya saja, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial dan aspek-aspek psikologis dari pekerja. Sehingga diharapkan akan dapat mengurangi penderitaan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.